

Analisis Perekonomian Masyarakat Akibat Semburan Lumpur Panas "Lapindo" Sidoarjo

Sukeesi

Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: greenpct@yahoo.com

Abstract: Hot Blast Mud in Sidoarjo bring remarkable impact to around society and also to economics activity of East Java. According to Indonesia Bank note (economic BI) Growth of East Java is not true many annoyed this hot mud disaster of Java Post edition (30/05/08) but, how with economics of society around in Sidoarjo. For that, require to be conducted by study how picture of is condition of economics of hit by society is indirect impact of hot mud blast in Sidoarjo. Target of this study: (1) discription is of economics condition in Sub-Province Pasuruan society effect of existence of hot mud blast " Lapindo" Sidoarjo; (2) Formulating priority issue faced by society; (3) Formulating constraints faced in handling affect economics. By using approach qualitative, this study yield information: namely counted 156 responder or around 78% expressing hot mud disaster in Sidoarjo result drop small industry it and micro like booth, haberdasherry shop, home industry also experience of similar constraint. Many perpetrator of is effort informal sector complain because natural earnings very drastic degradation after the happening of hot mud disaster in Sidoarjo. Even some of Small Industry perpetrator and Micro can't help desist because, insufficient earnings to close its operating expenses. 184 responder or around 92% expressing hot mud blast in Sidoarjo result time delivery of goods become longerly. To return again corporate world (what have time to be drawn effect of hot mud impact) and create opportunity an activity, recommended by strategy " model doubled nucleus;core development", namely create new nuclei outside industrial area region which have in Pasuruan during the time.

Key words: Blast mud, society of economic; cure of effort.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lebih dari 2 tahun peristiwa lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo terjadi, dimulai pada Tanggal 27 Mei 2006. Diawali adanya kepulan asap yang saat itu diduga dari kebocoran pipa dikawasan eksplorasi Lapindo Brantas Inc (LBI) di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika secara perlahan kebocoran tersebut memuntahkan "banjir" lumpur panas dan mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya. Daerah yang berdampak langsung tak kurang 10 pabrik harus tutup, 90 hektare sawah dan permukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Demikian juga tambak-tambak bandeng. Belum lagi jalan tol Surabaya-Gempol yang harus ditutup karena tergenang lumpur panas.

Akibatnya, semburan lumpur panas ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Genangan lumpur hingga setinggi 6 meter pada pemukiman, total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa, rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak lebih dari 1.683 unit, areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha (dan terus bertambah), lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan, kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon), terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Dalam hal ini khususnya untuk Kabupaten Pasuruan, di mana posisi geografis Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung memiliki konsekuensi serius pada berbagai aspek. Seperti yang terungkap dalam diskusi tentang dampak kemacetan raya Porong terhadap prospektif pengusaha yang diselenggarakan oleh radio Suara Surabaya pada tanggal 2 Maret 2008 misalnya, keluhan terhadap mobilitas infrastruktur bagi eksportir dan importir wilayah Kabupaten Pasuruan terutama keterlambatan tracking order nyampai ke gudang yang berwilayah di Surabaya, hal ini sangat berdampak luas sekali terutama terhadap stresing Sumber Daya Manusia, beban biaya produksi, pengalihan jalan alternatif, yang pada akhirnya sampai penutupan usaha. Sampai saat ini, sinergi para pelaku usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan solusi yang komprehensif tidak memberikan hasil yang menguntungkan bagi eksportir/importir tersebut.

Belum lagi dampak sosial lain yang dirasakan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap bencana lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo adanya migrasi penduduk. Kenyamanan bersosialisasi akan terganggu, munculah keresahan karena belum tercipta komunikasi, penyesuaian tradisi yang itu semua butuh waktu. Belum lagi, keresahan masyarakat pengguna jalan raya di sepanjang jalan menuju wilayah luapan lumpur akibat pengambilan tanah urukan dari Kabupaten Pasuruan untuk membuat tanggul lumpur yang tercecer-cecer membuat kotor, dengan menggunakan alat angkut tronton membuat bising. Rentetan keresahan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat ini akan terus muncul seiring dengan solusi penanganan banjir lumpur di Wilayah Porong. Seperti dampak pembuangan lumpur ke Sungai Porong, juga rencana akan adanya pembuangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo ke Sungai Mati di Wilayah Kecamatan Beji, dan masih banyak lagi rencana-rencana pembuangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo yang meresahkan masyarakat, hingga kinipun pemerintah belum membuat grant strategi adanya semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo ini.

Selain dampak-dampak di atas, dampak perekonomian masyarakat yang terjadi tidak bisa dipandang remeh. Kondisi masyarakat yang terkena dampak banjir lumpur

dalam banyak hal masih memprihatinkan. Dalam banyak kasus dapat dikatakan belum menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, munculnya teori konspirasi penyyuapan, hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur. Dan sebagainya, yang tidak mustahil gilirannya akan mampu memunculkan situasi konflik horisontal di antara warga, manakala pola penanganan secara komprehensif belum optimal dilaksanakan.

Posisi geografis Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung, sangat memungkinkan mempunyai implikasi yang strategis, bahwa setiap denyut nadi kehidupan masyarakat, pemerintah maupun pelaku dunia usaha pada kedua kawasan tersebut akan saling mempengaruhi dan memiliki dampak ekonomi maupun ekologi/lingkungan. Karena itu, "tragedi" banjir lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo juga mengakibatkan berbagai dampak yang cukup serius pada Kabupaten Pasuruan di mana hal tersebut membutuhkan upaya penanganan secara komprehensif yang segera dilakukan, sebelum dampak yang terjadi meluas baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perumusan Masalah

Dari fenomena yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasuruan sebagai akibat adanya semburan lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo?
2. Isu-isu prioritas apa saja dalam bidang perekonomian masyarakat yang mendesak untuk ditangani?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan masalah perekonomian masyarakat akibat semburan lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo?
4. Bagaimana strategi secara komprehensif dalam upaya penanganan dampak perekonomian masyarakat akibat semburan lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan?

Tujuan

Tujuan dilakukan kegiatan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui deskripsi kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Pasuruan akibat adanya semburan lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo;
2. Merumuskan isu-isu prioritas yang dihadapi masyarakat sebagai akibat semburan lumpur panas "Lapindo" Sidoarjo;

3. Merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan dampak per-ekonomian masyarakat akibat semburan lumpur panas “Lapindo” Sidoarjo.
4. Merumuskan strategi dan program secara komprehensif dalam upaya pengurangan dampak perekonomian masyarakat akibat semburan lumpur panas “Lapindo” Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan.

TINJAUAN TEORITIS

Tingkat Kerawanan Bencana di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai Negara yang rawan bencana. Bencana yang terus menerus menerpa bangsa Indonesia belakangan ini seakan-akan belum mau berakhir. Belum tuntas satu bencana ditanggulangi, sudah muncul bencana lain. Karena itu, tak heran jika Kyaw Win (Vijay Nath), *Medical Officer Emergency Humanitarian Action* (EHA), WHO Indonesia memberikan pernyataan menarik bahwa, “*Indonesia is emergency supermarket*” atau Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam jenis bencana. Hal ini dikemukakan beliau saat menjadi pembicara di acara “Lokakarya Nasional Kesiapan Darurat Bencana Industri” di ITS Surabaya Tanggal 28-29 Maret 2006. Ada berbagai macam bencana di Indonesia dan melanda di berbagai wilayah mulai dari bencana gunung api, gempa, tsunami, banjir (banjir lumpur Lapindo), longsor, angin ribut, konflik sosial, terorisme, polusi, penyakit (berbagai wabah, kelaparan, gizi buruk dst), badai, kekeringan, kecelakaan industri, dan kecelakaan transportasi dan sebagainya.

Kondisi Indonesia sebagai negara yang rawan bencana (alam) ini terjadi, karena secara geologis, Indonesia dibentuk dan terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Samudra Hindia-Australia di bagian Selatan, lempeng Euro - Asia dibagian Utara dan lempeng Samudra Pasifik di bagian Timur. Batas antar lempeng ini menyebabkan deformasi yang mengakibatkan terjadinya aktivitas gempa, tsunami, gunungapi dan pergeseran. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dengan jumlah curah hujan tinggi yang rawan banjir, dan sebagian lain terletak pada daerah tropis dengan curah hujan sedikit dan rawan kekeringan. Secara demografis pertumbuhan penduduk yang tinggi yang bertambah secara eksponensial dan kebijakan pemerintah yang sedikit peduli lingkungan menyebabkan sebagian penduduk tidak mengetahui dan atau terpaksa menempati daerah yang mestinya tidak layak dihuni karena rawan bencana.

Beberapa bencana yang cukup menyita perhatian dan penanganan (bahkan sampai sekarang masih belum optimal penanganannya) dalam kurun waktu terakhir antara lain, kedahsyatan akibat gempa dan tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darrusalam dan Sumatra Utara Desember 2004 telah menggoncangkan seluruh dunia, kemudian disusul Gempa Nias Tahun 2005. Juga gempa tektonik di Yogyakarta Jawa Tengah Tanggal 29 Mei 2006 yang disusul dengan bencana banjir

Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang masih menyisakan banyak persoalan dan sebagainya.

Munculnya berbagai bencana (alam) jelas bukan kesalahan pemerintah, atau siapapun masyarakat yang tinggal di negeri ini. Bencana muncul bukan karena banyaknya koruptor yang dibiarkan bebas menghisap kekayaan bangsa ini untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Juga bukan karena luruhnya daya kohesifitas sosial masyarakat sehingga cenderung menunjukkan sikap "anti" sosial, egois maupun individualis. Bencana adalah bencana. Artinya, epistemologi bencana bukan urusan yang patut diperdebatan, karena epistemologi bencana (alam) adalah kehendak yang Maha Kuasa, meskipun secara logis dan ilmiah perlu dicari akar permasalahan untuk menjelaskan terjadinya bencana tersebut.

Dengan pemahaman demikian, maka yang perlu disoroti bukanlah bencananya. Namun, bagaimana sistem yang dimiliki dan dipersiapkan dalam menghadapi dan penanganan suatu bencana. Sistem di sini adalah upaya-upaya kongkret dan sejak awal sudah dipersiapkan, bahkan telah disimulasikan, serta sistem penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan sehingga jika terjadi *event* yang sesungguhnya, dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis dapat diminimalkan.

Dampak Bencana

Pada dasarnya setiap aktivitas pembangunan eksplorasi Sumber Daya Alam akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan setempat (lingkungan Bio-fisik, dan lingkungan sosial-ekonomi-budaya). Apalagi jika aktivitas pembangunan eksplorasi tersebut telah berubah menjadi suatu 'bencana', maka akan membawa dampak yang sangat luas, kompleks pada lingkungan sekitar, seperti bencana banjir lumpur LAPINDO misalnya. Jangkauan sebaran dampak, ditentukan oleh tingkat dampak tersebut (primer, sekunder, dan seterusnya). Adapun yang dimaksudkan dengan dampak adalah terjadinya 'perubahan' karena suatu aktivitas pembangunan atau kejadian tertentu.

Steven A. Nelson (2002) menyebutkan dampak bencana bisa berlangsung cepat tapi bisa juga berlangsung sangat lama. Menurutnya, dampak bencana dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu dampak primer, sekunder dan tersier. Dampak primer merupakan dampak yang terjadi akibat proses bencana itu misalnya bangunan hancur akibat gempa dll. Dampak sekunder merupakan dampak akibat dampak primer misalnya gempa menyebabkan tsunami dan longsor; hancurnya pusat tenaga listrik dll. Dampak tersier merupakan dampak jangka panjang misalnya hancurnya habitat pantai akibat tsunami; rusaknya air tanah dan terganggunya lingkungan social-ekonomi masyarakat akibat luapan lumpur panas lapindo di Porong Sidoarjo, dst.

Dari fakta-fakta yang selama ini terjadi, Indonesia memang termasuk rawan bencana dengan segala dampak yang menyertainya baik primer, sekunder hingga

tersier. Hal ini karena kondisi alamnya, pemerintah, maupun Sumber Daya Manusianya, yang mana:

- (1) Belum adanya sosialisasi pengetahuan dasar tentang bencana yang dimiliki masyarakat;
- (2) Belum terlatihnya masyarakat mengetahui tanda-tanda alam, memahami dan mengantisipasi bencana; dan
- (3) Ada kekurangan pada cara pendidikan dan pengajaran kita sehingga kita lebih banyak percaya pada hal-hal yang irasional (klenik).

Dalam kaitannya dengan bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Yasin Yusuf (2006) menjelaskan atau mengelompokkan dampak yang terjadi menjadi dampak *tangible* dan dampak *intangible*. Dampak bencana *tangible* merupakan dampak bencana yang bisa dihitung/diukur dan biasanya dinyatakan dengan terminologi moneter. Dampak *tangible* dibedakan 2, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Dampak langsung yang terkait dengan lumpur Sidoarjo adalah terendamnya rumah warga termasuk terendamnya jalan tol Porong Gempol di sekitar pusat luberan Lumpur, sungai porong yang tercemar. Dampak tidak langsung adalah dampak yang terkait dengan matinya atau terganggunya perekonomian dan kehidupan sosial-budaya masyarakat akibat luberan lumpur Lapindo tersebut, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk karena sawahnya terendam lumpur, hilangnya pekerjaan penduduk akibat pabriknya terendam, terganggunya aktivitas distribusi barang menuju kota Surabaya akibat jalan tol ditutup dan sebagainya.

Dampak *intangible* lumpur Sidoarjo adalah dampak yang sulit diperkirakan dan dihitung dan menyangkut aspek yang lebih luas (sosial dan politik, termasuk psikologi). Demonstrasi-demonstrasi dan pemblokiran warga terhadap beberapa ruas-ruas jalan vital yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah salah satu contohnya. Menurunnya image investor, juga persepsi negatif masyarakat terhadap timnas, gubernur, bahkan presiden, ditambah rasa frustrasi masyarakat yang bisa berujung pada kekacauan sosial juga contoh dampak *intangible* lainnya.

Karena itu, penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan semestinya memperhitungkan dampak *tangible* baik yang langsung maupun tidak langsung, bahkan harus mengantisipasi dampak *intangible* yang mungkin terjadi. Ketidakpastian dalam penyelesaian dan penanganan bencana khususnya menyangkut masa depan korban, akan mampu membawa dampak psikologis seperti frustrasi dan gilirannya dapat berujung pada tindakan yang tidak diperkirakan sebelumnya (*intangible*), seperti berupa pemblokiran jalan-jalan utama seperti sudah diungkapkan di atas. Efek dominonya semakin menambah besar dampak kerugian tidak langsung dan kalau dibiarkan terus, satu fase lagi bisa menimbulkan kekacauan sosial (*social chaos*).

Mencermati dampak-dampak dari suatu bencana, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, dampak sosial akibat banyaknya korban jiwa (baik secara fisik ataupun psikis). Dampak ini langsung menimpa mereka yang kehilangan

anggota keluarga dan sanak saudara. Demikian pula ada yang kehilangan akses dan jaringan ke sumber-sumber perekonomian yang sudah sekian lama menjadi urat-nadi dan nafas kehidupan mereka.

Dengan fakta di atas, menjadi jelas bahwa setiap bencana (alam) akan memberikan kontribusi besar pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga dengan sendirinya, pasca bencana selalu diikuti oleh satu krisis kesejahteraan (*welfare crisis*).

Menurut Rakhmat Jalaluddin (2005), suatu *problems* dapat digolongkan sebagai masalah sosial atau personal tergantung pada kriteria: *Pertama*, dari segi *cause* atau sebabnya. Masalah kemiskinan misalnya, bisa dilihat sebagai masalah personal atau masalah sosial tergantung pada penyebabnya. Kalau ditemukan bahwa penyebabnya adalah kebodohan, kemalasan, tidak memiliki *skill* dan sebagainya, maka kemiskinan sebenarnya merupakan masalah personal. Sebaliknya, kemiskinan akan menjadi masalah sosial manakala penyebabnya berkaitan dengan faktor-faktor sosial, seperti krisis moneter atau ekonomi, resesi, bencana, atau akibat suatu kebijakan pemerintah tertentu. *Kedua*, dari segi *impacts* (akibat-akibat), yaitu bagaimana melihat suatu permasalahan yang ada sebagai masalah personal atau masalah sosial beserta konsekwensi akibat-akibatnya.

Selanjutnya, Rakhmat (2005) menjelaskan yang dimaksudkan dengan problem sosial yang banyak disitir para ilmuwan sosial sebagai sumber-sumber-sumber perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1. *Poverty* (kemiskinan)
2. *Crimes* (kejahatan)
3. *Conflict* (pertikaian atau konflik)

Adapun jenis-jenis hambatan yang merupakan dasar daripada masalah sosial, menurut Sumarnonugroho (1999) adalah beberapa hal berikut:

- ketergantungan ekonomi
- ketidakmampuan menyesuaikan diri
- kesehatan yang buruk
- kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi
- kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik.

Perilaku Masyarakat

Telah banyak pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan perilaku konsumen/organisasi. Namun, bagaimana memahami teori-teori tersebut dalam menerapkannya dalam perilaku masyarakat yang nota benek terkena dampak bencana. Pada dasarnya perilaku masyarakat di sebagian wilayah terkena dampak dari sebuah bencana (individu) dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

keadaan diluar individu tersebut. Faktor-faktor lingkungan, budaya, sub budaya, kelas sosial, keluarga, kelompok acuan, dsb. Sedangkan faktor internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan individu itu sendiri, meliputi: motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan dan sikap, usia dan tingkat kehidupan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dsb.

David L. Loudon & Albert J. Della Bitra, 1993, menyampaikan perilaku konsumen (Consumer Behavior) adalah suatu proses keputusan dan aktifitas fisik yang dilakukan oleh individu seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perilaku individu di antaranya dipengaruhi faktor lingkungan luar (external environment), yaitu variable-variabel yang terdapat pada lingkungannya, seperti:

- (1). Culture.
- (2). Sub culture.
- (3). Social class.
- (4). Social Group.
- (5). Family.
- (6). Personal.
- (7). Environmental.

Strategi Penanggulangan Bencana

Penanganan masalah dan dampak perekonomian masyarakat akibat (pasca) bencana tidak cukup dengan pendekatan yang biasa digunakan selama ini. Model pendekatan yang cenderung hanya menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek namun tidak memberikan satu perspektif penanganan dampak (ekonomi) bencana yang berjangka panjang, jelas berpotensi memicu timbulnya masalah-masalah lain. Masalah-masalah itu antara lain, krisis alokasi anggaran, tidak tepat sasaran penanganan, dan tidak tertanganinya masalah lain dengan baik dan tepat dan sebagainya. Tentu saja, pandangan ini tidak mengesampingkan praktik penanganan jangka pendek seperti yang diperlihatkan selama ini. Strategi penanganan bencana semestinya bersifat komprehensif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan multiaspek, baik yang bersifat *tangible* maupun yang *itangible*. Strategi penanganannya mestilah direncanaan sistematis dan terprogram, serta lintas sektoral. Misalnya, jika bencana dengan skala tertentu, dan menyedot kehilangan sumberdaya ekonomi dan sosial sebesar 1 trilyun, maka pasti dana yang diperlukan untuk penanggulangannya di atas jumlah itu. Penjumlahan ini sendiri muncul dari total jumlah kerugian material ditambah jumlah kerugian non material seperti kerugian-kerugian kehilangan potensi aset, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang masyarakat yang hilang, dan sebagainya.

Sedangkan, anggarannya sendiri bisa dialokasi dari APBN/APBD dan dana solidaritas masyarakat atau lembaga lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis tersebut, maka tidak akan terjadi tumpang tindih alokasi dan bantuan. Bahkan bisa

jadi pemerintah bisa menghemat jika ternyata dana kemanusiaan yang terkumpul dari masyarakat terkumpul cukup besar.

Beberapa perumusan strategi penanganan Dampak Sosial Bencana yang komprehensif, sistematis, terprogram dan berkelanjutan antara lain dapat dikembangkan sebagai berikut:

- Penilaian Kebutuhan (Need Assessment) tentang kebutuhan penanganan permasalahan perekonomian masyarakat akibat dampak Bencana.
- Penanggulangan/penanganan yang bersifat dasar dan simultan permasalahan perekonomian masyarakat dampak Bencana.
- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral/Pelaku/ Wilayah.
- Peningkatan Fungsi Sosial → melalui Konseling & pendampingan
- Perlindungan Sosial → bagi anak-anak, perempuan, orang-orang tua maupun kelompok rentan, → melalui kepedulian dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- Pemberdayaan sosial ekonomi misal, melalui bantuan sarana penunjang produksi dan akses modal usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Koperasi
- Pemberdayaan masyarakat melalui fungsionalisasi/rehabilitasi dan atau "mungkin" rekonstruksi lembaga-lembaga sosial yang selama ini terganggu aktivitasnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *qualitative research* yakni, memberikan diskripsi secara jelas tentang kondisi perekonomian masyarakat dan problematik sosial lainnya yang dialami masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagai akibat semburan lumpur panas "lapindo" Sidoarjo melalui survey. Dari hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan dampak terhadap perekonomian akibat semburan lumpur panas tersebut.

Lokasi Kegiatan dan Tehnik Pengambilan Sampel

Lokasi kegiatan kajian ini, dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dengan mengambil tiga wilayah kecamatan sebagai sampel. Pemilihan tiga kecamatan sebagai sampel menggunakan metode *purposive (purposive sampling)*. Adapun kecamatan yang dapat dipilih sebagai sampel apabila memenuhi 3 karakteristik, yaitu:

1. Lokasi yang berdekatan dengan lumpur panas;
2. Berdekatan dengan akses jalan raya Kabupaten Sidoarjo-Kabupaten Pasuruan; dan
3. Terdapat banyak usaha/industri di wilayah tersebut.

Berdasarkan karakteristik tersebut wilayah yang terpilih sebagai sampel yaitu: Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Bangil. Adapun responden yang dipilih sebagai sampel terdiri dari:

- Para pelaku usaha (pengusaha);
- Tokoh masyarakat; dan
- Masyarakat umum.

Variabel Penelitian

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Variabel

NO	VARIABEL	INDIKATOR
V1	Kenyamanan Tempat Tinggal	1. Kualitas kenyamanan tempat tinggal
V2	Tingkat Aktivitas Ekonomi/Kesejahteraan	1. Kuantitas kegiatan ekonomi 2. Jumlah penyerapan tenaga kerja 3. Ketersediaan sarana pengangkutan barang dan jasa 4. Waktu pengiriman barang dan jasa
V3	Tingkat Pengangguran/ PHK	1. Jumlah pengangguran/PHK
V4	Mobilitas Sosial	1. Perubahan waktu perjalanan 2. Perubahan kenyamanan dalam perjalanan 3. Perubahan keamanan dalam perjalanan 4. Perubahan kenyamanan dalam Perjalanan

Secara lebih jelas perhatikan diagram di bawah ini:

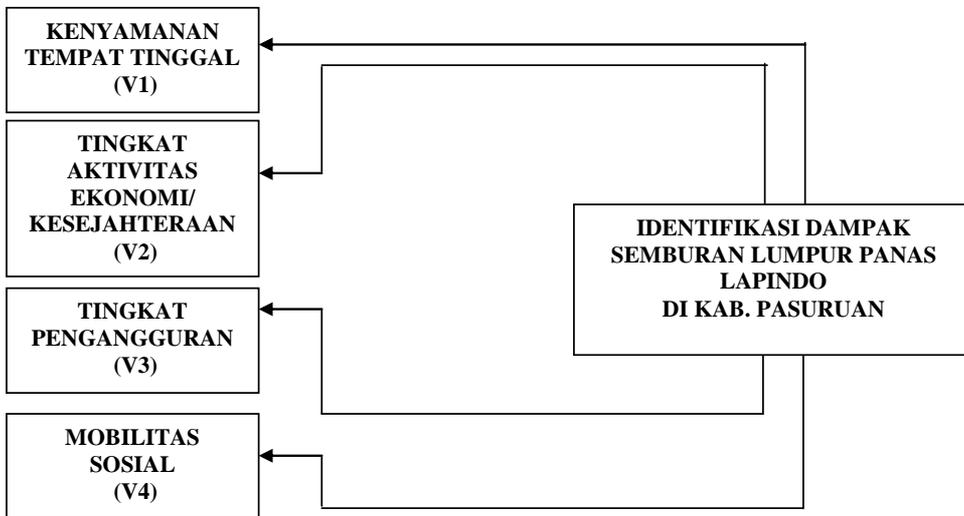


Diagram 1. Dampak Semburan Lumpur Panas "Lapindo" Sidoarjo Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Pasuruan

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

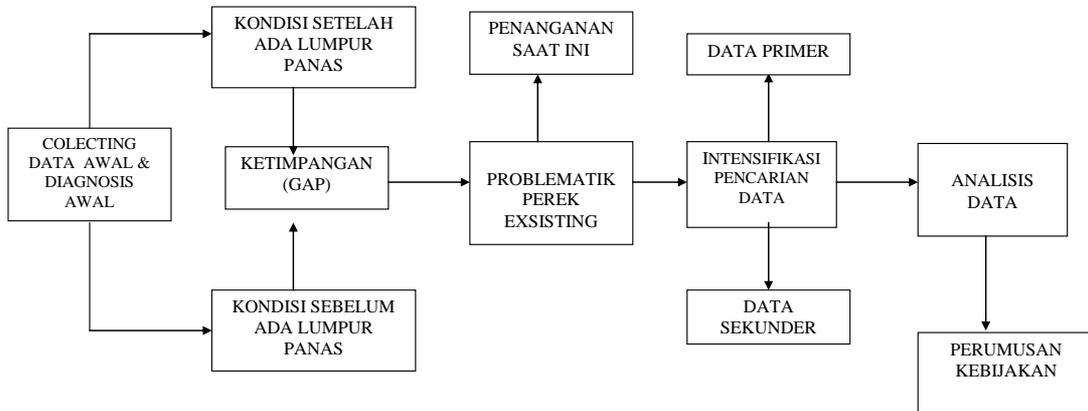


Diagram 2. Kerangka Pemikiran

Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan, di antaranya:

- 1) Melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fenomena aktifitas perekonomian dan sosial.
- 2) Melakukan pengumpulan data sekunder dari lembaga/instansi terkait.
- 3) Memberikan pertanyaan secara tertulis (kuesioner) kepada sebagian masyarakat untuk mengetahui pendapat dan keluhan masyarakat seputar dampak perekonomian akibat semburan lumpur Panas Sidoarjo.
- 4) Melakukan wawancara secara mendalam (indept interview) untuk menggali data/informasi secara mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keinginan, harapan masyarakat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dampak semburan lumpur Panas Sidoarjo.
- 5) Pelaksanaan Diskusi Kelompok (*Focus Group Discussion*) untuk mendiskusikan *issue-issue* yang muncul dari kuesioner maupun pada saat *indept interview*.

Teknik Analisis

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik yang berasal dari data primer maupun sekunder dilakukan pengolahan dan analisis sehingga, dapat diidentifikasi dan dirumuskan:

- 1) Permasalahan dampak perekonomian masyarakat yang ditimbulkan oleh semburan lumpur panas Sidoarjo.
- 2) Strategi penanggulangan terhadap perekonomian masyarakat akibat semburan lumpur Lapindo.

Pengolahan data dilakukan dengan proses tabulasi. Tabel-tabel dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptip kualitatif untuk menjelaskan keadaan dan temuan-temuan di lapangan.

Perumusan Strategi dan Kebijakan

Perumusan Strategi Penanggulangan Dampak Perekonomian Masyarakat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan, yang meliputi antara lain:

- ❖ Penilaian Kebutuhan (*Need Assessment*) tentang kebutuhan penanganan permasalahan dampak perekonomian masyarakat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan.
- ❖ Penanggulangan/penanganan dasar dan simultan permasalahan terhadap dampak perekonomian masyarakat akibat semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan.
- ❖ Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral/Pelaku/Wilayah.
- ❖ Peningkatan Fungsi Sosial → melalui Konseling & pendampingan sosial
- ❖ Perlindungan Sosial → bagi anak-anak, perempuan, orang-orang tua maupun kelompok rentan, → melalui kepedulian dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- ❖ Pemberdayaan sosial ekonomi misalnya, melalui bantuan sarana penunjang produksi dan akses modal usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Koperasi
- ❖ Pemberdayaan masyarakat melalui fungsionalisasi/rehabilitasi dan atau "mungkin" rekonstruksi lembaga-lembaga sosial yang selama ini terganggu aktivitasnya.

ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner dari 3 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Bangil dengan jumlah desa sampel 9 desa dengan jumlah responden yang terkumpul dengan data sempurna sebanyak 200 responden serta dilengkapi hasil indept interview kepada beberapa tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat desa menunjukkan dampak Semburan Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo terhadap variabel-variabel penelitian perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Dampak Semburan Lumpur Terhadap Kenyaman Tempat Tinggal

Semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga mengganggu kenyamanan tempat tinggal masyarakat Kabupaten Pasuruan, terutama wilayah yang berdekatan dengan pusat semburan. Pendapat responden tentang dampak lumpur panas Sidoarjo terhadap kenyamanan tempat tinggal seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Dampak Lumpur Panas Terhadap Kenyamanan Tempat Tinggal

No.	Keterangan	Responden	Persentase
a.	Kurang nyaman	164	82.00%
b.	Tetap	15	7.50%
c.	Lebih nyaman	1	0.50%
d.	Lainnya	20	10.00%
Total		200	100.00%

Sumber: Data Primer

Terlihat bahwa, dampak semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo mengganggu kenyamanan tempat tinggal masyarakat Kabupaten Pasuruan, terutama wilayah yang berdekatan dengan pusat semburan. Pendapat responden tentang dampak lumpur panas

Sidoarjo terhadap kenyamanan tempat tinggal diketahui bahwa sebagian besar responden, yakni sebanyak 164 responden atau 82% mengatakan semburan lumpur panas Sidoarjo mengurangi kenyamanan tempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tempat hunian yang mereka tempati saat ini menjadi tidak nyaman. Setiap hari menghirup bau menyengat yang berasal dari gas yang dikeluarkan oleh semburan lumpur panas Sidoarjo bahkan, terdapat sebagian masyarakat tidak tahan terhadap bau menyengat tersebut sehingga, timbul batuk-batuk, sesak nafas, perut mual dan sebagainya.

Responden yang lain, mengatakan daerah yang saat ini ditempati sudah tidak nyaman lagi untuk hunian, selain bau menyengat, terganggu kenyamanannya karena diwilayahnya saat ini banyak kedatangan warga korban lumpur panas Lapindo Sidoarjo baik sebagai pengontrak maupun ikut menumpang di saudaranya. Banyaknya pendatang baru ini, menurut responden, mengusik keamanan dan kenyamanan warga setempat. Semburan lumpur panas Sidoarjo juga mengakibatkan meningkatnya suhu udara di wilayah sekitarnya. Adanya suhu udara yang semakin panas, bau kurang enak dan makin banyaknya pendatang baru, kondisi jalan searing macet mengakibatkan masyarakat mudah marah. Sehingga ketika tersulut permasalahan sedikit saja emosi masyarakat mudah meledak.

Dampak Semburan Lumpur Terhadap Aktivitas Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis dampak semburan lumpur panas Sidoarjo terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pasuruan digunakan tiga indikator yaitu: *transportasi (waktu pengiriman hasil produksi)*, *aktivitas usaha*, dan *penyerapan tenaga kerja*. Tanggapan responden tentang dampak lumpur panas Sidoarjo terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Dampak Lumpur Terhadap Kegiatan Usaha

No.	Keterangan	Responden	Persentase
a.	Meningkat	14	7.00%
b.	Tetap	14	7.00%
c.	Menurun	163	81.50%
d.	Lainnya	9	4.50%
Total		200	100.00%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa, dari 200 responden yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo aktivitas ekonomi masyarakat Pasuruan, mengakibatkan banyak perusahaan yang tutup atau melakukan PHK, Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan sektor informal gulung tikar, akibat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sebanyak 163 responden atau sekitar 81,50% menyatakan semburan lumpur panas Sidoarjo mengakibatkan menurunnya aktivitas usaha, faktor utama yang menyebabkan menurunnya kegiatan usaha karena terganggunya sarana transportasi, yakni sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas angkutan barang dan penumpang, terutama jalur dari Pasuruan kearah Sidoarjo/Surabaya atau sebaliknya. Tanggapan responden terhadap waktu pengiriman barang seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Dampak Lumpur Terhadap Waktu Pengiriman Barang

No.	Keterangan	Responden	Persentase
a.	Lebih cepat	1	0.50%
b.	Tetap	1	0.50%
c.	Lebih lama	184	92.00%
d.	Lainnya	14	7.00%
Total		200	100.00%

Sumber: Data Primer

Sebanyak 92% responden menyatakan semburan lumpur panas Sidoarjo mengakibatkan waktu pengiriman barang menjadi lebih lama. Resiko yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha di wilayah Pasuruan, akibat keterlambatan pengiriman barang tersebut, selain meningkatkan biaya operasi, mereka juga sering mendapatkan komplain dari rekan bisnisnya.

Penurunan aktivitas usaha tidak hanya terjadi pada sektor industri saja, usaha perdagangan pun mengalami kondisi yang serupa. Warung, toko kelontong, pedagang pasar, pedagang kaki lima juga merasakan hal tersebut. Menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat berdampak pada pula pada sektor informal yang menjadi tumpuan sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan. Banyak pelaku usaha sektor informal mengeluh karena pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan yang sangat drastis semenjak terjadinya semburan lumpur panas Sidoarjo. Bahkan, sebagian para pelaku Usaha Kecil dan Mikro terpaksa harus berhenti karena, pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup biaya operasionalnya.

Dampak Lumpur Terhadap Pengangguran

Semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo menimbulkan dampak luar biasa terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Sektor industri yang menjadi faktor andalan untuk menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terganggunya sarana transportasi telah mengakibatkan penurunan omset penjualan yang cukup besar. Dalam kondisi yang demikian perusahaan harus mengurangi volume produksinya, sehingga perusahaan dengan terpaksa harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa “gulung tikar” karena pendapatan yang diperoleh tidak dapat untuk menutup biaya operasional.

Menurut pengakuan responden, tambahan biaya transport yang harus dikeluarkan untuk para penunjuk jalan “Pendarjet” antara Sidoarjo dan Pasuruan sekitar Rp. 100.000,- setiap kali mengambil bahan baku, belum termasuk tambahan biaya bahan bakar karena kenaikan harga BBM dan kemacetan lalu lintas. Sementara harga jual produknya tidak mungkin dinaikkan karena, jika dinaikkan tidak laku terjual kalah bersaing. Untuk menopang kehidupan sehari-hari responden terpaksa hanya membantu usaha saudaranya yang juga pelaku usaha mikro, yakni industri sandal.

Kondisi ini mengakibatkan tingkat pengangguran di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pasuruan, terutama di Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Gempol meningkat cukup drastis karena, karyawan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Pasuruan tersebut sebagian berasal dari Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol.

Dampak Lumpur Terhadap Mobilitas Sosial

Tidak berfungsinya Jalan Tol Surabaya – Gempol karena, terputus di Ruas Porong, akibat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo mengakibatkan kemacetan luar biasa di jalan arteri arah Pasuruan-Sidoarjo dan sebaliknya, serta arah Malang ke Sidoarjo dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan seluruh kendaraan yang selama ini melalui Jalan Tol terpaksa harus melalui jalan arteri akibatnya, kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melewatinya sehingga, V/C ratio di jalan arteri porong sangat tinggi (di atas 1). Kondisi tersebut mengakibatkan waktu tempuh dalam perjalanan menjadi jauh lebih lama dari waktu normal, terutama pada saat jam-jam sibuk yakni, waktu berangkat kerja dan pulang kerja.

Pendapat responden tentang dampak semburan lumpur panas Sidoarjo terhadap waktu tempuh dalam perjalanan seperti terlihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Dampak Lumpur Terhadap Waktu Tempuh Perjalanan

No.	Keterangan	Responden	Persentase
a.	Lebih lambat	184	92.00%
b.	Tetap	6	3.00%
c.	Lebih cepat	0	0.00%
d.	Lainnya	10	5.00%
Total		200	100.00%

Sumber: Data Primer

Hampir seluruh responden yakni sebanyak 184 responden atau sekitar 92% mengatakan bahwa, semburan lumpur panas Sidoarjo mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas sehingga, waktu tempuh dalam perjalanan menjadi lebih lama dari waktu normal. Hal ini juga berpengaruh terhadap kenyamanan berkendara dalam perjalanan, terutama pengguna akses jalan Porong yang disebabkan tidak berfungsinya jalan Tol. Banyak kendala yang membuat pengguna jalan menjadi tidak nyaman. Dengan kecepatan yang amat rendah dan sering berhenti karena macet keamanan pengemudi juga terganggu karena, sering dihampiri pedagang asongan untuk menjajakan dagangannya serta anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen, gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kemacetan jalan juga dimanfaatkan sebagian masyarakat menarget pengguna jalan alternatif sehingga sangat merugikan para sopir dan pengguna jalan lainnya. Salah satu contoh kasus misalnya, para pengguna jalan dari Sidoarjo menuju Pasuruan/Malang atau sebaliknya yang melalui jalur alternatif yakni, melalui jalan desa di sebelah Utara dan Timur pusat semburan harus mengeluarkan uang tidak kurang Rp. 25.000,- untuk diberikan kepada "oknum penarget" yang banyak bertebaran di sudut-sudut jalan dengan dalih memberi petunjuk jalan kepada para pengguna jalan tersebut.

Perumusan Strategis, Kebijakan dan Program

Logika pertimbangan ini didasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mencatat issue dan contoh gejala, mengenal pasti kekuatan-kekuatan penentu, dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana yang kesemuanya dilandasi oleh visi dan misi pemerintah dalam menanggapi persoalan bencana di wilayahnya.

Issue-Issue Pokok dan Gejala-Gejala

Beberapa issue issue yang diamati dalam pembahasan-pembahasan tentang penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo antara lain:

- Aspek Kebijakan: belum efektifnya kebijakan sebagai suatu hukum formal yang koheren sebagai aturan dasar dalam penanganan bencana lumpur di Sidoarjo.
- Manajemen: kurang jelasnya arah manajemen dalam issue bencana, lemahnya penataan kelembagaan, belum ada mekanisme-mekanisme yang baku, kelemahan program dan belum optimalnya kegiatan yang koheren.
- Kapasitas: kurangnya kemampuan teknis, keterbatasan alokasi sumberdaya, potensi masyarakat belum dikerahkan secara optimal.

Adapun gejala-gejala yang diamati adalah:

1. Ancaman dampak perekonomian masyarakat yang menyangkut aspek kriminalitas, mobilitas sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kenyamanan dan sebagainya tidak dikenal pasti dan dipantau secara berkala
2. Pada tataran implementasi, masih belum optimal agenda, program, dan rencana penanganan bencana lumpur Sidoarjo
3. Belum ada program mitigasi yang jelas baik struktural maupun non struktural
4. Penguatkuasaan (enforcement) peraturan penanganan bencana masih kurang jelas.
5. Keberadaan lembaga/organisasi penanganan bencana masih bersifat sporadis
6. Belum ada mekanisme pendeklarasian keadaan bencana
7. Tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi dalam penanggulangan bencana.
8. Penyelesaian pemulihan dan rehabilitasi dampak bencana masih berlarut-larut
9. Kurang jelas arah dan agenda kerjasama antar pemerintahan secara regional maupun nasional.
10. dan sebagainya.

Kebijakan Umum

Kebijakan Penanggulangan Dampak Terhadap Perekonomian Masyarakat akibat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan berdasarkan perspektif ekonomi sosial adalah:

1. Dalam setiap upaya penanggulangan bencana perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
2. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
3. Penanggulangan bencana merupakan salah satu fungsi pemerintah oleh karena itu, dilakukan oleh pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggungjawab utama.
4. Pemulihan masalah kesehatan fisik dan trauma psikologis 'korban' bencana lumpur panas Sidoarjo

5. Peningkatan akses seluas-luasnya bagi keluarga 'korban' bencana terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan sosial dasar
6. Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan yang menjadi 'korban' bencana untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar
7. Peningkatan kualitas manajemen penanggulangan dampak pemberdayaan ekonomi produktif lumpur panas Sidoarjo

Strategi Penanggulangan Bencana

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk menanggulangi tekanan 'kemiskinan' masyarakat sebagai akibat bencana semburan lumpur panas Sidoarjo, membutuhkan strategi yang komprehensif sebagai berikut:

1. Di tingkat kelembagaan, yang terpenting adalah melakukan merevitalisasi peran lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai bidang penyangga agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat 'korban' bencana dan mendorong peran lembaga-lembaga lokal agar lebih mendukung proses transparansi pelaksanaan program penanggulangan dampak terhadap perekonomian masyarakat akibat bencana semburan lumpur panas Sidoarjo
2. Di tingkat komunitas, yang terpenting melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat 'korban' bencana yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar cultural di masyarakat.
3. Di tingkat keluarga, yang merupakan fokus utama sasaran dari seluruh program penanggulangan bencana, yang terpenting adalah memberikan kesempatan dan memberdayakan kemampuan *bargaining* dan kemampuan keluarga-keluarga 'korban' untuk melakukan diversifikasi usaha.
4. Di tingkat Individu, fokus penanggulangan bencana adalah pada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat 'korban' bencana, khususnya pembinaan wawasan, ketrampilan, mental dan spiritual, yang terkait dengan pengembangan eksistensi diri dan bukan sekedar survive dalam menghadapi kondisi bencana. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat memberikan suatu keahlian untuk dapat lebih produktif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang memberikan nilai tambah pada penghasilan secara mandiri yang bertumpu pada ekonomi lokal.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat 'korban' bencana lumpur panas Sidoarjo pada tingkat program intervensi, secara umum dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
Di tingkat kelembagaan, yang terpenting adalah melakukan merevitalisasi peran lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai badang penyangga agar lebih berpihak kpd kepentingan masyarakat 'korban' bencana	Pengembangan dan revitalisasi BLK, BUM-Des, KURK, Takesra-kukesra dsb yang mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga 'korban' bencana	- Peningkatan ketrampilan <i>mll life skill</i> - Pendamp sosial bagi KUB dan Keluarga 'korban' Rentan Sos Ekon, serta perempuan pencari nafkah. - Bantuan stimulan modal usaha untuk kegiatan produktif	- Bappekab - PMD - Dinas tenaga kerja - Dinas Koperasi &UKM - Dinas perindustrian dan perdagangan
Di tingkat komunitas, yang terpenting melakukan pengembang prog pemberdayaan masyarakat 'korban' bencana yang bertump pd pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar kultural di masyarakat.	- Pengembangan sistem arisan bergulir - Pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro yg dikelola masyarakat lokal.	- Arisan bergulir, akan tetapi berupa peralatan usaha - Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) ekonomi produktif - Pembentukan Pokmas miskin ('korban' bencana)	- Bappekab - PMD - Dinas tenaga kerja - Dinas Koperasi &UKM - Dinas perindustrian dan perdagangan
Di tingkat keluarga, yang terpenting adalah memberikan kesemp dan memberdayakan kemamp <i>bargaining</i> & kemampuan keluarga- <i>kel</i> 'korban' untuk mlk <i>diversifikasi</i> usaha.	Pengembangan dan pemberdayaan diversifikasi usaha 'korban' bencana	Pelatihan ketrampilan alternatif yang berbeda antara suami-isteri keluarga 'korban' bencana	Bappekab - PMD - Dinasker Dinkop&UKM - Dinas perind dan perdagangan
Di tingkat Individu, adalah pada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat 'korban' bencana.	Pemberian prioritas bantuan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan	- Pelat ketrampilan alternatif, terutama bagi perempuan - Pemberian prioritas bantuan modal usaha bagi perempuan - Pelat manajemen usaha bagi kel miskin 'korban' bencana.	Bappekab - PMD - Dinas tenaga kerja - Dinkop &UKM - Dinas perindustrian dan perdagangan

Selanjutnya, jika sistem penanganan telah didesain secara 'rapi' dan terintegrasi dengan komitmen seluruh *stakeholders*—baik pemerintah maupun masyarakat—yang harus menjadi fokus program penanganan selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Komitmen melakukan pemberdayaan (*empowerment*) ini dipastikan akan jauh memiliki *greget* sosiologis, ekonomi, maupun politik yang besar, selain akan memberikan dampak penggunaan anggaran negara dengan tepat. Sebab dengan pendekatan pemberdayaan, masyarakat bukan hanya dilayani dengan pasif namun aktif dan partisipatif. Dengan pendekatan demikian, maka masyarakat yang terkena bencana diajak untuk—bersama pemerintah dan masyarakat lainnya—mengatasi dampak bencana secara bersama.

KESIMPULAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada hakekatnya bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia akan membawa dampak pada berbagai aspek: ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Dampak ini tidak hanya dirasakan pada wilayah tempat bencana, melainkan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Seperti dalam kajian ini, bencana semburan lumpur panas Sidoarjo juga membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasuruan yakni, seperti: hilangnya sebagian mata pencaharian, sulitnya usaha, meningkatnya kriminalitas, kurang nyamannya tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan masyarakat terganggu, banyaknya PHK dan sulitnya meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan jumlah PMKS di masyarakat.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, *review* terhadap sejumlah hasil studi, dan diskusi yang dilakukan dengan *stakeholders* yang terkait maka, beberapa temuan pokok yang perlu digaris bawahi adalah:

Pertama, Bencana lumpur juga mengganggu kenyamanan tempat tinggal masyarakat desa-desa wilayah penelitian di Kabupaten Pasuruan, terutama wilayah yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur panas. Mereka mengatakan daerah yang saat ini ditempati sudah tidak nyaman lagi untuk hunian, selain bau menyengat, mereka khawatir bila sewaktu-waktu lumpur panas meluber rumah-rumah ikut tergenang dan barang-barang tidak bisa diselamatkan, sehingga masyarakat akan menderita kerugian yang sangat besar. Kekhawatiran lain yang dirasakan masyarakat (responden) terjadinya penurunan tanah di wilayah mereka yang akan dapat menimbulkan kerusakan bangunan. Alasan lain yang menyebabkan terganggu kenyamanannya karena diwilayahnya saat ini banyak kedatangan warga korban Lumpur panas baik sebagai pengontrak maupun ikut menumpang di saudaranya. Banyaknya pendatang baru ini, menurut responden, mengusik keamanan, dan kenyamanan warga setempat.

Kedua, Bencana semburan lumpur panas Sidoarjo juga membawa dampak pada sektor usaha masyarakat desa-desa wilayah penelitian di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan usaha mengalami penurunan karena terganggunya sarana transportasi, yakni sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas angkutan barang dan penumpang, terutama jalur dari Pasuruan kearah Sidoarjo/Surabaya atau sebaliknya. Sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas tersebut mengakibatkan waktu pengiriman barang kepada konsumen menjadi lebih lama, sehingga biaya pengiriman membengkak, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga pokok produksi. Menurunnya kegiatan usaha yang disebabkan terganggunya sarana transportasi tersebut mempunyai imbas pula terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar responden yakni, sebanyak 156 responden atau sekitar 78% menyatakan bencana lumpur panas Sidoarjo mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di Pasuruan. Karena, produksi yang dihasilkan menurun sebagai konsekuensinya perusahaan harus mengurangi tenaga kerja yang dilibatkan sehingga, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja diberbagai perusahaan. Demikian juga Usaha Kecil dan Mikro seperti warung, toko kelontong, industri rumah tangga juga mengalami kendala yang serupa. Banyak pelaku usaha sektor informal mengeluh karena pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan yang sangat drastis semenjak terjadinya bencana lumpur panas

Sidoarjo. Bahkan sebagian para pelaku Usaha Kecil dan Mikro terpaksa harus berhenti (ataupun 'gulung tikar') karena, pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup biaya operasionalnya.

Ketiga, Fenomena lain dari dampak perekonomian masyarakat yang diakibatkan bencana lumpur panas Sidoarjo adalah meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial pada masyarakat desa-desa wilayah penelitian di Kabupaten Pasuruan yakni, anak jalanan, gelandangan, pengemis, perempuan rawan ekonomi, dan penyandang masalah sosial yang lain.

REKOMENDASI

Untuk menanggulangi dampak perekonomian masyarakat akibat bencana semburan lumpur panas Sidoarjo di Kabupaten Pasuruan, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, melalui hasil penelitian ini maka, ke depan agenda dan program penanggulangan yang segera perlu diwujudkan adalah:

Pertama, untuk mencegah dampak yang multi aspek menjadi tidak berkepanjangan, sebagai akibat kemacetan arus lalu lintas di jalan arteri arah Surabaya – Pasuruan/Malang dan sebaliknya maka, perlu dilakukan peningkatan koordinasi lintas pelaku, lintas sektoral, dan lintas wilayah dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi (dan lainnya) di kawasan semburan bencana lumpur panas. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini, diharapkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang ditimbulkan kegiatan pembangunan infrastruktur itu juga akan dapat membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar, sekaligus mengurangi ekonomi biaya tinggi dan sekaligus mendorong perkembangan aktivitas ekonomi lokal.

Kedua, Upaya penanganan persoalan PHK, pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja seyogianya dilakukan dalam satu paket dengan program untuk mengeliminasi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Untuk mengembalikan kembali dunia usaha (yang sempat lesu akibat dampak lumpur panas) dan menciptakan kesempatan kerja, direkomendasikan strategi "model pembangunan inti berganda" yakni, menciptakan *nucleus-nucleus* baru di luar wilayah kawasan industri yang telah ada di Kabupaten Pasuruan selama ini. Dengan membangun inti-inti kegiatan ekonomi baru di wilayah baru, paling tidak ada dua keuntungan yang bakal diperoleh. Pertama, di wilayah tersebut akan tumbuh lapangan kerja baru yang berskala masal. Kedua, laju urbanisasi penduduk pedesaan akan dapat dieliminasi.

Ketiga, salah satu katup penyelamat bagi korban PHK dan para pengangguran adalah sektor informal, karena itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi sektor informal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah banyak terbukti senantiasa memiliki daya serap yang sangat lentur, fleksibel, mandiri, dinamis, murah modal.

Keempat, perlu dukungan dalam meningkatkan kerjasama polisi (aparatus keamanan) dan masyarakat dalam penanganan masalah-masalah kriminal dan gangguan sosial lainnya. Hal ini perlu didorong, mengingat upaya penanganan tindak kejahatan di mata masyarakat masih dianggap sepenuhnya menjadi tugas aparat kepolisian, dan respon masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kejahatan cenderung apatis, atau bahkan kontra-produktif. Di antara sesama warga masyarakat sendiri, daya kohesi dan solidaritas sosial tampaknya sudah mulai memudar, sehingga tidak lagi terasa ada jaminan rasa aman di benak masyarakat meski mereka ada pada situasi keramaian di zona-zona publik.

Kelima, perlu dipertajam fokus kelompok sasaran program penanggulangan dampak sosial bencana lumpur panas Sidoarjo pada masyarakat desa-desa wilayah kajian di Kabupaten

Pasuruan. Dengan mempertajam fokus kelompok sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya penanggulangan dampak bencana benar-benar dapat terarah, dan menjangkau banyak lapisan masyarakat. Satu hal yang semestinya disadari adalah, bila fokus kelompok sasaran 'korban' bencana tidak terfokus, maka biasanya dalam implementasinya akan rawan bias, dan tidak mustahil tidak tepat sasaran.

Keenam, mengingat keterbatasan dan dan kemampuan yang dimiliki Pemerintah, sebagai alternatif program penanggulangan dampak perekonomian masyarakat terhadap bencana, yang dikembangkan ada baiknya jika lebih berorientasi pada upaya pengembangan dukungan dan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas yang berbasis masyarakat (*community support system*). Disadari bahwa di berbagai komunitas senantiasa ada potensi-potensi swakarsa yang terbukti eksis dan fungsional membantu usaha penanganan masalah-masalah sosial, dan pemberdayaan ekonomi seperti kelompok pengajian, PKK, pondok pesantren dan semacamnya. Salah satu kelebihan kelebihan kelompok-kelompok lokal seperti ini adalah mereka pada umumnya memiliki akar hubungan dengan masyarakat sekitarnya sehingga, kemungkinan untuk menjalin dan mengembangkan hubungan kemasyarakatan yang kontekstual menjadi lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Proyek Sphere, 2006, *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Dalam Respos Bencana*, Grasindo, Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2005, *Rekayasa Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sumarnonugroho, T, 2000, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Hanindita, Yogyakarta.
- Laporan, 2006, "*Lokakarya Nasional Kesiapan Darurat Bencana Industri*" di ITS Surabaya Tanggal 28-29 Maret 2006.
- Posisi *WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas*, http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070707_lumpurlapindo_kp/
- Harian Jurnal Nasional Tgl. 26 Jul 2006.
- Harian Surya, Tgl. 10 Juni 2006.
- Koran Tempo, Tgl. 16 Juni 2006.
- Harian Kompas, 19 Juni 2006.
- United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Tahun 2006.
- Wikipedia Indonesia, 2006. *Banjir Lumpur Panas Sidoarjo*.